

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA UTARA



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ALAMAT : JL. SEI BATUGINGGING NO. 6 MEDAN 20154

WEBSITE : <https://dkp.sumutprov.go.id>

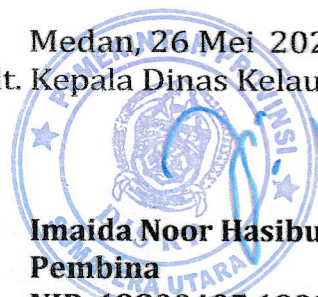
E-MAIL : Programdiskpprovsu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029. Dalam laporan ini disajikan gambaran mengenai perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan upaya pemecahan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Medan, 26 Mei 2026
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Imaida Noor Hasibuan, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19800405 199810 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	5
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	5
1.4 Dasar Hukum	7
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	7
BAB II.....	9
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
BAB III.....	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan....	21
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	24
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	26
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	28
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .	29

3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	56
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	79
3.2	Realisasi Anggaran.....	84
BAB IV.....		93
LAMPIRAN.....		94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n.....	10
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah.....	14
Tabel 2.5 Perjanjian Perubahan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	15
Tabel 2.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	16
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	21
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja.....	24
Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	27
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	28
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	29
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	59
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	79
Tabel 3.8 Tingkat Capaian Anggaran Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama	85
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 3.1 Pengujian Kimia	38
Gambar 3.2 Pengujian Mikrobiologi	35
Gambar 3.3 Pengujian Organoleptik.....	38
Gambar 3.4 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	39
Gambar 3.5 Monitoring Hasil Perikanan	40
Gambar 3.6 Kegiatan Asessment KAN	41
Gambar 3.7 Kegiatan Lembaga Sertifikasi Produk	42
Gambar 3.8 Penyerahan Simbolis Asuransi Nelayan	46
Gambar 3.9 Pengadaan Pakan Ikan.....	49
Gambar 3.10 Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tahun 2025 merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sehingga diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. LKJIP ini disusun untuk menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang diukur melalui IKU, keterkaitan antara perencanaan dan realisasi kinerja, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Penyusunan LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan perikanan tangkap, perikanan budidaya, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Penyelenggaraan Administrasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Berikut bagan

struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Orang Kepala Bidang, 5 (lima) orang Kepala UPTD, 1 (satu) Orang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Keuangan, 15 (lima) belas orang Kepala Seksi pada 5 (lima) UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1 (2024)	Rp 52.019.793.462
APBD	Tahun n (2025)	Rp 33.875.408.765

Sumber : SIPD 2025

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara antara lain yaitu :

1. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap;
2. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya;
3. Belum optimalnya tingkat kelangsungan hidup benih;
4. Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dipecahkan. Manakala hal tersebut tidak dipecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara serius, sistematis dan komprehensif. Hal yang menjadi dasar ditetapkannya isu strategis dan menjadi fokus perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah pengembangan potensi dan kondisi sejalan dengan perkembangan serta dinamika kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Isu strategis tersebut juga dapat menjadi bahan dalam mendesain skenario rencana pembangunan dan rencana pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Kelautan dan perikanan dalam 5 tahun ke depan. Sejalan dengan konteks tersebut, di bawah ini akan dikemukakan berbagai isu strategis yang terkait dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Utara dikategorikan ke dalam dua aspek yaitu ekonomi dan lingkungan sebagai berikut :

1. Luasnya wilayah teritorial laut Sumut dengan banyaknya pulau memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya laut
2. Masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan serta sumberdaya manusia
3. Produktivitas nelayan masih tergolong rendah disebabkan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran <5GT sehingga jangkauan operasional terbatas
4. Produktivitas dan daya saing usaha perikanan karena integrasi sistim produksi di hulu dan hilir belum optimal, karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan, kualitas SDM dan kelembagaannya meliputi pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan Informasi belum memadai.
5. Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan serta sumberdaya manusia.
6. Wilayah pesisir memiliki potensi kerusakan ekosistem seperti abrasi, sedimentasi, pencemaran, dan tindakan *destructive fishing* sehingga diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan di Sumatera Utara. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja, Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan di Sumatera Utara	- Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan - Terwujudnya Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipasif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	395.427	410.213	427.103,34	435701	463078,68
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	340.000	342.279	350.836	360.484	371.298
			Tingkat Konsumsi Ikan	35,01	35,31	35,66	36,02	36,38
			Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	101,35	102,54	103,32	104,1	105,43
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) (Indeks)	98	98	99	100	101
			Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan (Hektar)	27.343,57	7703,41	1415,36	1880,91	9474,49
			Kontribusi SeKor Perikanan Terhadap PDRB (Persen)	1,6	1,7	1,9	2	2,2

Sumber : Renstra Dinas KP Provsu Periode 2025-2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan di Sumatera Utara Sasaran : - Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan - Terwujudnya Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipasif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Ton / Tahun	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap dalam Waktu Tertentu	Produksi Perikanan Tangkap = Jumlah Hasil Perikanan Tangkap	Laporan Statistik Perikanan Tangkap
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Ton /Tahun	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Budidaya dalam Waktu Tertentu	Produksi Perikanan Budidaya = Jumlah Hasil Perikanan Budidaya	Laporan Statistik Perikanan Budidaya
		Tingkat Konsumsi Ikan	Persen	Tingkat Konsumsi Masyarakat Sumatera Utara terhadap Komoditas Ikan yang dikonversi dalam Satuan kg per-kapita pertahun dalam Satuan kg per-kapita pertahun	Tingkat Konsumsi Ikan adalah Penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat (AKI = A+B+C)	Data BPS Perikanan
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	Perbandingan Indeks harga yang diterima nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (Ib)	NTN = Harga yang diterima nelayan (It)/ harga yang dibayar nelayan (Ib)	Data BPS

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks	Perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib)	$NTPi = \frac{\text{Harga yang diterima nelayan (It)}}{\text{harga yang dibayar pembudidaya (Ib)}}$	Data BPS
		Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	Hektar	Luasan Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (Permen-KP Nomor 14/Permen- KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan)	Jumlah Kawasan konservasi perairan = Luas area konservasi awal + Kawasan Konservasi baru	Pengukuran ke lokasi kawasan Pesisir dan Perairan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	besarnya sumbangan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan sektor perikanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam satuan persentase (%)	Kontribusi Perikanan (%)= $\frac{\text{PDRB Sektor Perikanan}}{\text{Total PDRB}} \times 100 \%$	Data BPS

Sumber: Renstra Dinas KP Provsu 2025-2029, Indikator Kinerja Utama Dinas KP Provsu

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan di Sumatera Utara	- Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan - Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/ Tahun	395.427
			Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	340.000
			Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/ Kap/ Tahun	35,01
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	101,35
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks	98
			Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	Hektar	27.343,57
			Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	1,6

Sumber : Renstra, Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	395.427 (Ton/Tahun)
2	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,35 (Indeks)
3	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	c. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	340.000 (Ton/Tahun)
		d. Angka Konsumsi Ikan	35,01 Kg/Kap/Thn
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	e. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98 (Indeks)
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perairan	f. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	27.343,57 Hektar
		g. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	1,6 Persen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 518.822.500	APBD
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.422.127.173	APBD
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.103.628.457	APBD
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 404.562.632	APBD
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 245.103.850	APBD
	TOTAL	Rp. 6.694.244.612	

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dari segi indikator nya sama dengan Perubahan Perjanjian Kinerja yaitu Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, Nilai Tukar Nelayan(NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), Angka Konsumsi Ikan, Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan dan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran yang disebabkan adanya rasionalisasi sesuai dengan perubahan anggaran yang ditetapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 .

Berikut Perjanjian Perubahan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

**Tabel 2.5 Perjanjian Perubahan Kinerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	395.427 (Ton/Tahun)
2	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	b. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,35(Indeks)
3	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	c. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	340.000 (Ton/Tahun)
		d. Angka Konsumsi Ikan	35,01 Kg/Kap/Thn
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	e. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98 (Indeks)
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perairan	f. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	27.343,57 Hektar
		g. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	1,6 Persen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 387.772.400	APBD
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.079.235.000	APBD
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.346.367.040	APBD
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 424.550.632	APBD
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 295.093.850	APBD
	TOTAL	Rp. 5.533.018.922	

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut

rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
II	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	100%
1.	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Data dan Informasi tentang Kelautan dan Perikanan yang tersedia	100%
1.1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	100%
1.2	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang disusun	100%
2.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Rekomendasi Izin Perikanan Tangkap atau Pemanfaatan Ruang Laut yang terbit	100%
2.1	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah ijin berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan	100%
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	100%
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang tersedia	100%
1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100%
1.2	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100%
2.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang tersedia	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	100%
3.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Rekomendasi Izin Perikanan Tangkap atau Pemanfaatan Ruang Laut yang terbit	100%
3.1	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	100%
4.	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang tersedia	100%
4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	100%
4.2	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	100%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	100%
1.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang tersedia	100%
1.1	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	100%
V.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Perikanan	100%
1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100%
1.1	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	100%
1.2	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (kegiatan)	100%
2.1	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	100%
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	100%
1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	100%
1.1	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	100%
1.2	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	100%
2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
2.1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%

Sumber : Dokumen APBD Dinas KP Provinsi Sumut Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	a. Produksi Perikanan Tangkap	395.427 (Ton/Tahun)	396.610,31* (Ton/Tahun)	100,29 %	Laporan Statistik Perikanan Tangkap kementerian (KKP)
2	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	b. Produksi Perikana Budidaya	340.000 (Ton/Tahun)	343.550* (Ton/Tahun)	101,04 %	Laporan Statistik Perikanan Budidaya Kementerian (KKP)
		c. Tingkat Konsumsi Ikan	35,01 (Kg/Kap/ Tahun)	35* (Kg/Kap/ Tahun)	100 %	Data BPS
3	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	d. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,35 (Indeks)	107,62* (Indeks)	106 %	Data BPS
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	e. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98 (Indeks)	95,39* (Indeks)	97,33 %	Data BPS
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perairan	f. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	27.343,57 (Hektar)	27.343,57* (Hektar)	100 %	Pengukuran ke lokasi kawasan Pesisir dan Perairan
		g. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	1,6 (Persen)	1,67* (Persen)	100 %	Data BPS

*Data Sangat Sementara menunggu release dari KKP dan BPS

Sumber : Portal Data KKP RI, BPS Sumut

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	a. Produksi Perikanan Tangkap	482.343,21	395.818	395.427	396.610,31*	100,29 %
2	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	b. Produksi Perikanan Budidaya	218.998	365.928	340.000	343.550*	101,04 %
		c. Tingkat Konsumsi Ikan	51,32	57,76	35,01	35*	100 %
3	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	d. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	108,36	100,95	101,35	107.62*	106 %
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	e. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	97,30	95,61	98	95,39*	97,33 %
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perairan	f. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	-	44.336,01	27.343,57	27.343,57*	100 %
		g. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	-	1,7	1,6	1,47*	97,87 %

*Data Sangat Sementara menunggu release data dari KKP
Sumber : Portal Data KKP RI, BPS Sumut

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Baseline)	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target jangka menengah renstra					Tingkat Kemajuan
					2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(9) =4/5*100
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	a.Produksi Perikanan Tangkap	395.818	396.610,35* (Ton / Tahun)	395.427	410.213	427.103,34	435701	463078,68	100,29
2	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	b.Produksi Perikanan Budidaya	365.928	343.550* (Ton / Tahun)	340.000	342.279,00	350.836	360.484	371.298	101,04
		c.Tingkat Konsumsi Ikan	57,76	35,01* (Kg/Kap/ Tahun)	35	35,31	35,66	36,02	36,38	100
3	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	d. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,95	107,62* (Indeks)	101,35	102,54	103,32	104,1	105,43	106
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	e. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	95,61	95,39* (Indeks)	98	98	99	100	101	97,33
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perairan	f. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	44.336,01	27.343,57* (Hektar)	27.343,57	7703,41	1415,36	1880,91	9474,49	100
		g. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	1,7*	1,67* (Persen)	1,6	1,7	1,9	2	2,2	91,87

*Data Sangat Sementara menunggu release data dari BPS Sumut
Sumber : Portal Data KKP RI, BPS Sumut

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	a. Produksi Perikanan Tangkap	396.610,31 (Ton/Tahun)	7.850.000 (Ton/Tahun)	5.05 %
2.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	b. Produksi Perikanan Budidaya	343.550 (Ton/Tahun)	6.760.000 (Ton/Tahun)	5.08 %
		c. Tingkat Konsumsi Ikan	35 (Kg/Kap/Tahun)	-	
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	d. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,62 (Indeks)	101,76*	99,6
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	e. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	95,39 (Indeks)	102,07*	95
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perairan	f. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	27.343,57 Ha	29.900.000* Ha	0,00017 %
		g. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	1,67 (Persen)	1,47 (Persen)	100%

* data sementara menunggu release dari KKP dan BPS

Sumber : PK, Laporan Evaluasi Renja Dinas KP Provsu Tahun 2025, Capaian Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, dan Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (ISSN 3047-1753; Volume II, 2025);

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	a. Produksi Perikanan Tangkap	395.427 (Ton/Tahun)	396.610,31 (Ton/Tahun)	100,29 %	Laporan Statistik Perikanan Tangkap
2	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	b. Produksi Perikanan Budidaya	340.000 (Ton/Tahun)	343.550 (Ton/Tahun)	101,04 %	Laporan Statistik Perikanan Budidaya
		c. Tingkat Konsumsi Ikan	35,01 (Kg/Kap/Tahun)	35 (Kg/Kap/Tahun)	100 %	Data BPS
3	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	d. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,35 (Indeks)	107,62 (Indeks)	106	Data BPS
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	e. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98 (Indeks)	95,39 (Indeks)	97,33	Data BPS
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perairan	f. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	27.343,57 (Hektar)	27.343,57 (Hektar)	100 %	Pengukuran ke lokasi kawasan Pesisir dan Perairan
		g. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	1,6 (Persen)	1,67 (Persen)	100 %	Data BPS

1. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap tahun 2025 terealisasi sebesar 396.510,31 ton atau 100,29% dari target yang ditetapkan sebesar 395.427 ton. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan telah melampaui target tahunan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan meluncurkan inisiatif "Kawasan Kampung Nelayan" yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat nelayan, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup secara

menyeluruh. Konsep Kawasan Kampung Nelayan hadir sebagai inovasi pengelolaan kawasan nelayan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga menitikberatkan pada keberlanjutan biofisik, penguatan kelembagaan lokal, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang memadai. Konsep Kawasan Kampung Nelayan menjadi sangat penting sebagai upaya pemberdayaan masyarakat nelayan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Kampung Nelayan tidak hanya menekankan pada aspek produksi perikanan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan kelembagaan local. Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Berkah juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program nasional pembangunan perikanan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2029 yang menekankan pada penguatan sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif Kawasan Kampung Nelayan Sumatera Utara merupakan pendekatan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan fokus pada wilayah pesisir pantai timur (seperti Desa Tali Air Permai di Kabupaten Batu Bara, Desa Silau Baru di Kabupaten Asahan) dan Kelurahan Perjuangan di Kota Tanjungbai), wilayah pesisir pantai barat (Desa Mela II di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kelurahan Sibolga Ilir di Kota Sibolga) serta wilayah pesisir kepulauan Nisa (Desa Siofabanua, Kabupaten Nias Utara), Provinsi Sumatera Utara. Program ini didukung oleh kerangka kebijakan nasional dan daerah yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan berusaha, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur pengelolaan perikanan berkelanjutan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2022 yang fokus pada konservasi dan zonasi perairan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2024-2029 yang diharapkan memberikan dukungan strategis dan anggaran.

Pada tahun 2025, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian kampung nelayan. Kampung Nelayan merupakan kawasan permukiman masyarakat pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Aktivitas perikanan tangkap menjadi tulang punggung perekonomian lokal serta berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan perikanan tangkap di Kampung Nelayan didominasi oleh nelayan skala kecil dengan armada berupa perahu tanpa motor/perahu motor tempel. Jenis alat tangkap yang digunakan antara lain jaring insang, pancing ulur, dan alat tangkap tradisional lainnya yang disesuaikan dengan kondisi perairan setempat. Berdasarkan data realisasi, produksi perikanan tangkap menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, serta kemampuan sarana dan prasarana penangkapan, tercapaian realisasi hasil perikanan tangkap melebihi dari target yang ditentukan merupakan kondisi yang mendukung pencapaian maksimal.

Faktor Pendukung:

- Ketersediaan sumber daya ikan yang masih cukup baik
Ketersediaan sumber daya ikan yang relatif terjaga menjadi faktor utama dalam mendukung peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap. Kondisi stok ikan yang masih cukup baik menunjukkan bahwa perairan di beberapa wilayah pesisir Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- Program pembinaan dan pendampingan nelayan yang berkelanjutan
Adanya program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada nelayan menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan tangkap. Pendampingan yang berkelanjutan mendorong nelayan untuk memahami teknik penangkapan yang ramah lingkungan, manajemen usaha, serta pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam konteks ini Kawasan Kampung Nelayan Berkah dijadikan sebagai wadah pembinaan dan pendampingan kepada nelayan. Penyusunan dokumen kajian Kampung Nelayan Berkah menjadi indikator penting dalam

menilai kesiapan sosial masyarakat. Nelayan yang telah mendapatkan pembinaan akan lebih adaptif terhadap program pengembangan kawasan dan mampu mengoptimalkan manfaat ekonomi dari hasil tangkapan.

- Kondisi cuaca yang relatif mendukung aktivitas penangkapan ikan

Kondisi cuaca dan iklim yang relatif stabil pada periode tertentu turut mendukung kelancaran aktivitas penangkapan ikan. Intensitas hari melaut yang tinggi akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap

Faktor Penghambat:

- Fluktuasi hasil tangkapan akibat perubahan musim

Perubahan musim dan kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan pergeseran daerah penangkapan ikan serta perubahan pola migrasi ikan. Hal ini menyulitkan nelayan dalam menentukan lokasi tangkapan yang potensial. Akibatnya, waktu melaut menjadi lebih lama, biaya operasional meningkat, dan hasil tangkapan tidak stabil. Ketidakpastian ini secara langsung menghambat peningkatan produksi serta memengaruhi pendapatan nelayan.

- Keterbatasan teknologi tangkap pada sebagian nelayan

Sebagian nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional dengan jangkauan terbatas dan efisiensi rendah. Minimnya akses terhadap teknologi modern, seperti alat navigasi, pendeteksi ikan, dan kapal yang lebih memadai, menyebabkan nelayan sulit mengoptimalkan potensi sumber daya ikan. Kondisi ini menghambat peningkatan volume tangkapan, menurunkan produktivitas, dan memperbesar kesenjangan hasil antara nelayan tradisional dan nelayan yang telah menggunakan teknologi lebih maju.

- Kenaikan harga BBM dan biaya operasional melaut.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional, termasuk biaya perjalanan melaut, perawatan kapal, es untuk penyimpanan ikan, dan logistik awak kapal. Beban biaya yang tinggi membuat sebagian nelayan mengurangi frekuensi melaut atau memperpendek waktu operasi. Dampaknya, produksi perikanan

tangkap menurun dan keuntungan usaha menjadi semakin kecil, sehingga keberlanjutan usaha nelayan kecil terancam.

Solusi Alternatif yang Dilakukan:

- Peningkatan efisiensi usaha penangkapan melalui modernisasi alat tangkap.
- Penguatan kelembagaan nelayan dan akses permodalan.
- Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan untuk menjamin keberlanjutan.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya mencapai 343.550 ton atau 101,04% dari target sebesar 340.000 ton, menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Pembentukan Kawasan Perikanan Budidaya Sumatera Utara merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Kawasan ini dirancang sebagai kawasan budidaya yang mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari pemanfaatan teknologi, manajemen sumber daya alam, hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan Kawasan Kampung Budidaya Perikanan juga sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di daerah.

Pentingnya pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya yang menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Misalnya, produksi ikan budidaya di Sumatera Utara pada tahun 2024 baru mencapai sekitar 65% dari potensi maksimal yang ada, dengan kontribusi utama dari budidaya air tawar dan air payau. Data ini menunjukkan bahwa masih ada peluang besar untuk meningkatkan produksi dan pendapatan melalui pengelolaan kawasan budidaya yang lebih terarah dan berkelanjutan. Sasaran Kawasan Kampung Budidaya ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya pada aspek produksi budidaya perikanan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian kampung budidaya.

Dokumen kajian kampung budidaya bertujuan menghasilkan arahan pengembangan yang tepat sasaran. Dengan hadirnya kampung budidaya, pembudi daya lokal terlibat secara aktif dalam usaha budidaya ikan sebagai sumber penghasilan utama, bukan sekadar kegiatan sampingan.

Faktor Pendukung:

- Ketersediaan benih dan pakan yang relatif memadai

Ketersediaan benih bermutu dan pakan yang cukup menjadi faktor krusial dalam menjaga kesinambungan usaha budidaya. Benih yang sehat dan unggul secara genetik akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan seragam, sehingga masa pemeliharaan dapat lebih singkat dan risiko kerugian dapat ditekan. Demikian pula dengan ketersediaan pakan yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas nutrisi, sangat menentukan keberhasilan produksi. Apabila distribusi benih dan pakan berjalan lancar, maka siklus budidaya dapat berlangsung tanpa hambatan berarti, yang pada akhirnya mendorong peningkatan volume produksi.

- Dukungan program pemerintah dalam pengembangan kawasan budidaya.
Program pemerintah dalam pengembangan kawasan budidaya turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan sarana dan prasarana, fasilitasi perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pendampingan teknis kepada kelompok pembudidaya. Pengembangan kawasan budidaya yang terintegrasi juga mendorong terciptanya skala ekonomi, sehingga biaya produksi lebih efisien dan akses pasar menjadi lebih luas. Dengan adanya intervensi program yang terarah dan berkelanjutan, produktivitas budidaya meningkat dan keberlanjutan usaha pembudidaya dapat lebih terjamin.

Faktor Penghambat:

- Fluktuasi harga pakan.

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam kegiatan budidaya perikanan. Fluktuasi harga pakan yang tidak stabil menyebabkan meningkatnya biaya produksi secara signifikan. Kondisi ini menyulitkan pembudidaya dalam merencanakan anggaran usaha dan menjaga efisiensi

biaya. Ketika harga pakan naik, sebagian pembudidaya terpaksa mengurangi dosis pakan atau frekuensi pemberian pakan, yang berdampak pada pertumbuhan ikan menjadi tidak optimal, waktu panen lebih lama, dan volume produksi menurun.

- Ancaman penyakit ikan.

Serangan penyakit ikan menjadi salah satu risiko utama dalam usaha budidaya. Penyakit dapat menyebar dengan cepat, terutama pada sistem budidaya dengan kepadatan tinggi dan manajemen kesehatan yang belum optimal. Dampaknya meliputi tingginya angka kematian ikan, penurunan kualitas hasil panen, serta meningkatnya biaya pengobatan dan pencegahan. Kondisi ini menghambat produktivitas dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pembudidaya.

- Keterbatasan kualitas air di beberapa lokasi budidaya.

Kualitas air yang tidak memenuhi standar, seperti kadar oksigen terlarut rendah, pencemaran, pH yang tidak stabil, atau tingginya kandungan bahan organik, dapat mengganggu pertumbuhan dan kesehatan ikan. Lingkungan perairan yang kurang baik menyebabkan ikan stres, rentan terhadap penyakit, dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Hal ini menghambat peningkatan produksi karena pertumbuhan ikan tidak optimal dan risiko gagal panen menjadi lebih tinggi.

Solusi Alternatif yang Dilakukan:

- Peningkatan pengawasan kesehatan ikan.
- Pendampingan teknis kepada pembudidaya.
- Penguatan sistem biosekuriti dan manajemen kualitas air.

3. Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan masyarakat mencapai 35 kg/kapita/tahun atau 100% dari target. Dalam rangka meningkatkan Tingkat Konsumsi Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu khususnya UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) melaksanakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang terdiri dari:

a. Kegiatan Pengujian Laboratorium

Kegiatan ini adalah sebagai acuan utama dalam mengoperasionalkan dan menerapkan sistem manajemen mutu di dalam Laboratorium sekaligus sebagai Paramater untuk mengukur kinerja seluruh sistem di UPTD PMHP Medan tahun 2025. Fungsi laboratorium pengujian dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyediakan jasa pengujian yang akurat dan terpercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat dan industri untuk menggunakan jasa tersebut dan juga untuk meningkatkan pemasukan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Pembangunan infrastruktur,

Kegiatan Pengujian Laboratorium ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a. Pengujian Kimia meliputi: Penentuan kadar logam berat Merkuri (Hg), Plumbum (Pb) dan kadmium (Cd) pada produk perikanan, Antibiotik Chloramphenicol, AOZ, AMOZ, AHD, SEM, Fluoroquinolone, Histamin, TVBN, Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Protein, Kadar Lemak, Tetracyclin Malachite Green dan Leucomalachite Green.
- b. Pengujian Mikrobiologi meliputi: Uji Angka Lempeng Total (ALT), Coliform dan Escherichia coli, Salmonella, Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus dan enterococci intestinal.
- c. Pengujian Organoleptik meliputi: pengujian organoleptik atau sensori produk perikanan segar, beku, kering dan produk Tuna, Sarden dan Makerel dalam kemasan kaleng..
- d. Pengujian Fisika meliputi: Bobot Tuntas, Filth

Pengujian-pengujian ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang diterapkan.

Pada tahun 2025 UPTD PMHP menghasilkan Laporan Hasil Analisa (LHA) / Laporan Hasil Pengujian mencapai 182 (seratus delapan puluh dua) LHA. Ini sangat menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan terbitnya PERDA No. 1 Tahun 2024 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2024, Perda ini menjadi dasar hukum baru pemungutan pajak dan retribusi untuk mengoptimalkan

pendapatan daerah dan adanya efisiensi anggaran APBD tahun 2025 di UPTD PMHP sehingga tidak memenuhi kebutuhan belanja bahan kimia dan perbaikan alat laboratorium sehingga PAD di UPTD PMHP sangat menurun dari tahun sebelumnya yang pernah mencapai target ± 6 milyar pada tahun 2016 dan pada tahun 2023 sebelum Perda No. 1 dikeluarkan mencapai $\pm 1,2$ milyar.



Gambar 3.1 Pengujian Kimia



Gambar 3.2 Pengujian Mikrobiologi



Gambar 3.3 Pengujian Organoleptik

b. Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan lingkungan adalah proses pengamatan dan pengukuran secara teratur untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan dan Kesehatan ikan di dalam suatu sistem budidaya atau ekosistem tetap optimal.



Gambar 3.4 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan

c. Monitoring Hasil Perikanan

Monitoring Hasil Perikanan adalah proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data tentang hasil perikanan untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab meliputi hasil tangkapan, jumlah dan nilai produksi perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan monitoring hasil perikanan adalah : Mendapatkan data dan informasi kondisi kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya sebagai bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan pada ikan yang dikonsumsi, mencegah dan melindungi masyarakat dari mengkonsumsi bahan-bahan yang membahayakan bagi kesehatan.



Gambar 3.5 Monitoring Hasil Perikanan

d. *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan *Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)*

Good Manufacturing Practices (GMP) adalah fondasi wajib keamanan pangan. GMP mengatur tata cara produksi yang baik dan benar (fasilitas, karyawan, proses) untuk menghasilkan produk bermutu, sementara SSOP adalah prosedur spesifik sanitasi dan higiene harian (kebersihan alat, karyawan, air, hama) proses pengolahan dan pengemasan dengan cara yang aman dan higienis untuk mencegah kontaminasi. Keduanya merupakan program prasyarat sebelum menerapkan HACCP.

e. *Assesment KAN pada LSPro di UPTD PMHP*

Assesment Kan yaitu proses evaluasi yang dilakukan oleh KAN untuk menilai kemampuan laboratorium atau Lembaga sertifikasi dalam memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan dengan tujuan menilai kemampuan laboratorium dalam memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan, meningkatkan kualitas laboraorium dalam melakukan pengujian atau

sertifikasi dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap laboratorium.



Gambar 3.6 Kegiatan Assesment KAN

f. Kegiatan Survailen pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Surveilen (Pengawasan Berkala) pada klien yang telah mendapat Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI untuk produk ikan sarden ataupun makarel dalam kemasan kaleng. Surveilen merupakan bagian Tugas dari Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) UPTD PMHP dalam pemeliharaan sertifikat klien untuk memberi keyakinan bahwa produk yang diproduksi masih memenuhi persyaratan SNI, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.

Saat ini LSPro UPTD PMHP memiliki 2 (dua) klien / UPI dengan ruang lingkup SNI Wajib yaitu SNI Tuna dalam kemasan kaleng dan SNI sarden dan makarel dalam kemasan kaleng. Minimal satu kali dalam satu tahun LSPro harus melakukan kegiatan survailen kepada klien. Tujuan kegiatan survailen sertifikasi SNI adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang

telah disertifikasi SNI tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan secara berkelanjutan, serta mematuhi persyaratan yang tercantum dalam skema sertifikasi. Surveilans dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian sesuai parameter uji yaitu : a. Organoleptik, b. Histamin, c. Kadmium (Cd), d. Merkuri (Hg), e. Timah Putih (Sn), f. Timbal (Pb), g. Arsen (As), h. Filth dan i. Bobot Tuntas. Sebagian pengujian-pengujian dilaksanakan di laboratorium UPTD. PMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu.



Gambar 3.7 Kegiatan Lembaga Sertifikasi Product (LSPro)

Faktor Pendukung

1. **Tersedianya Laboratorium Pengujian Terakreditasi KAN.** UPTD PMHP telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan 17065:2012. Hal ini menjamin mutu dan keamanan produk perikanan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi ikan.
2. **Pelaksanaan Pengujian Mutu (Kimia, Mikrobiologi, Organoleptik, Fisika).** Pengujian terhadap logam berat, histamin, bakteri patogen, dan parameter lainnya memastikan ikan yang beredar aman dan layak konsumsi.

3. **Penerapan GMP dan SSOP pada UPI/UMKM**

Pembinaan terhadap pelaku usaha meningkatkan kualitas produk olahan ikan sehingga lebih higienis dan menarik bagi konsumen.

4. **Monitoring Kesehatan Ikan dan Monitoring Hasil Perikanan**

Kegiatan ini memberi jaminan bahwa ikan yang dikonsumsi masyarakat aman dan terpantau kualitasnya.

5. **Sertifikasi SNI Produk Perikanan (LSPro)**

Produk bersertifikat SNI (tuna, sarden, makarel kaleng) meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Faktor Penghambat

1. **Efisiensi Anggaran APBD Tahun 2025**, yang mengakibatkan kurangnya belanja bahan kimia dan perawatan alat dan menyebabkan penurunan jumlah pengujian.

2. **Terbatasnya Perawatan dan Kalibrasi Peralatan**, berpotensi menurunkan kapasitas dan kecepatan pelayanan pengujian.

3. **Tidak Adanya Peningkatan Kompetensi SDM**, Tanpa pelatihan, inovasi dan efektivitas layanan bisa stagnan.

4. **Menurunnya Jumlah Laporan Hasil Analisa (LHA)**
Turunnya jumlah pengujian dapat menurunkan pengawasan mutu produk di pasaran.

Dampak dari faktor penghambat tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk perikanan, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat konsumsi ikan.

Solusi dan Rekomendasi Strategis untuk Mendukung Angka konsumsi ikan

1. **Penguatan Dukungan APBD untuk Operasional Laboratorium**
Menjamin ketersediaan bahan kimia, perawatan alat, dan operasional rutin sehingga pengawasan mutu tetap optimal.

2. **Peningkatan Edukasi dan Kampanye Konsumsi Ikan**
Mengintegrasikan hasil pengujian laboratorium sebagai bahan kampanye bahwa ikan di Sumut aman dan berkualitas.

3. **Peningkatan Kompetensi SDM**, Melalui pelatihan teknis laboratorium dan sertifikasi tambahan guna meningkatkan profesionalisme layanan.
4. **Penguatan Kolaborasi dengan UPI, UMKM, dan Stakeholder** Mendorong lebih banyak produk bersertifikat SNI sehingga variasi produk ikan meningkat dan menarik minat konsumsi masyarakat.
5. **Digitalisasi Informasi Keamanan Pangan Perikanan** , Publikasi rutin hasil monitoring untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan mencapai 107,62 dari target 101,35 atau 106% dari target, menunjukkan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sebagaimana diketahui, Nilai Tukar Nelayan merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan (baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya usaha penangkapan). NTN mencerminkan tingkat kesejahteraan nelayan—apabila $NTN > 100$ berarti daya beli dan kesejahteraan nelayan meningkat.

Faktor Pendukung

Pemberian asuransi nelayan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai salah satu indikator kesejahteraan nelayan. Melalui program perlindungan yang difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, nelayan memperoleh jaminan atas risiko kecelakaan kerja maupun musibah saat melaut. Mengingat karakteristik usaha perikanan tangkap yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan memiliki tingkat risiko tinggi, perlindungan asuransi memberikan kepastian finansial ketika terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Dengan adanya santunan atau klaim asuransi, nelayan tidak perlu menanggung seluruh beban biaya secara mandiri yang berpotensi meningkatkan pengeluaran secara drastis.

Perlindungan tersebut berkontribusi dalam menekan kenaikan indeks harga yang dibayarkan nelayan, terutama pada saat terjadi risiko usaha. Selain itu, asuransi juga membantu menjaga kesinambungan aktivitas

produksi karena nelayan memiliki sumber dana untuk kembali melaut tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Stabilitas pendapatan yang terjaga akan mempertahankan bahkan meningkatkan indeks harga yang diterima nelayan.

Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan merupakan bantuan pembayaran premi yang diberikan dengan jangka waktu pertanggungan asuransi 1 (satu) tahun yang mulai berlaku sejak Realisasi Polis Asuransi diterbitkan oleh Penanggung. Target Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan Tahun 2025 sebanyak 6.100 (Enam Ribu Seratus) nelayan yang dibagikan di 22 Kabupaten Kota dengan rincian sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	PESERTA ASURANSI NELAYAN TA. 2025 (6.100 orang)
1	LANGKAT	1.600
2	MEDAN	182
3	DELI SERDANG	471
4	SERDANG BEDAGAI	400
5	BATUBARA	900
6	ASAHAN	450
7	TANJUNG BALAI	273
8	LABUHAN BATU UTARA	200
9	LABUHAN BATU RAYA	174
10	TAPANULI SELATAN	57
11	MANDAILING NATAL	174
12	TAPANULI TENGAH	138
13	SIBOLGA	152
14	NIAS	74
15	GUNUNG SITOLI	33
16	NIAS UTARA	200
17	NIAS BARAT	85
18	NIAS SELATAN	400
19	TOBA	37
20	TAPANULI UTARA	32
21	HUMBANG HASUNDUTAN	28
22	SIMALUNGUN	40
TOTAL		6.100

Sasaran Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan meliputi nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan Risiko yang dijamin:

- a. Kematian;
- b. Cacat tetap; dan
- c. Biaya pengobatan.

Pemberian kartu Asuransi diberikan melalui dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota untuk kemudian disalurkan ke yang bersangkutan



Gambar 3.8 Penyerahan Simbolis Asuransi Nelayan

Faktor Penghambat:

1. Kenaikan harga kebutuhan operasional.

Kenaikan harga kebutuhan operasional, seperti bahan bakar minyak (BBM), es untuk penyimpanan ikan, perawatan kapal, alat tangkap, serta logistik awak kapal, menyebabkan biaya melaut meningkat secara signifikan. Sementara itu, harga jual hasil tangkapan tidak selalu mengalami kenaikan yang sebanding. Ketidakseimbangan antara biaya produksi dan pendapatan ini menurunkan daya beli nelayan, sehingga Nilai Tukar Nelayan (NTN) cenderung melemah. Kondisi tersebut menjadi penghambat karena mengurangi kesejahteraan nelayan dan membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun investasi usaha.

2. Ketergantungan pada musim penangkapan.

Kegiatan penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, dan gelombang laut. Pada musim paceklik atau cuaca buruk, nelayan tidak dapat melaut secara optimal, sehingga pendapatan menurun atau bahkan tidak ada pemasukan sama sekali. Sementara itu, kebutuhan rumah tangga dan biaya operasional tetap harus dipenuhi. Ketergantungan pada musim ini menyebabkan pendapatan nelayan tidak stabil, yang pada akhirnya menekan Nilai Tukar Nelayan. Hal ini menjadi penghambat karena ketidakpastian pendapatan membuat nelayan sulit meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga.

Solusi Yang diharapkan :

1. Penyederhanaan prosedur pendaftaran dan klaim

Proses administrasi yang mudah, cepat, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan nelayan terhadap program asuransi. Jika klaim dapat dicairkan tepat waktu saat terjadi risiko, nelayan dapat segera melanjutkan aktivitas produksi. Hal ini menjaga kesinambungan pendapatan (indeks harga yang diterima), sehingga berdampak positif terhadap NTN.

2. Peningkatan dukungan subsidi premi bagi nelayan kecil

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memperluas cakupan

subsidi premi agar tidak membebani nelayan berpenghasilan rendah. Dengan premi yang terjangkau, pengeluaran rutin nelayan tidak meningkat signifikan, sehingga komponen indeks harga yang dibayarkan dapat ditekan dan NTN lebih terjaga.

3. Integrasi dan validasi data nelayan berbasis sistem informasi terpadu

Basis data yang akurat memastikan program tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih. Ketepatan sasaran akan meningkatkan efektivitas perlindungan, sehingga ketika terjadi risiko, bantuan benar-benar diterima oleh nelayan yang aktif dan produktif. Dampaknya, stabilitas pendapatan lebih terjamin dan NTN dapat meningkat secara berkelanjutan.

4. Penguatan kelembagaan nelayan (koperasi/kelompok usaha bersama)

Kelembagaan yang kuat dapat menjadi perantara dalam pengelolaan kepesertaan asuransi, pendampingan klaim, serta penguatan akses permodalan. Dengan risiko usaha yang lebih terkendali dan akses modal yang lebih sehat, nelayan tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Beban pengeluaran dapat ditekan, sehingga rasio antara pendapatan dan pengeluaran membaik dan NTN meningkat.

5. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan mencapai 95,39 atau 97,33% dari target, belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator sektor Nilai Tukar Pembudidaya ikan adalah pelaksanaan kegiatan pengadaan pakan, dan produksi benih dan calon induk ikan yang dilaksanakan di UPT Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut.

a. Kegiatan Pengadaan Pakan Ikan

Kegiatan pengadaan pakan benih ikan pada tahun 2025 dilaksanakan di dempon sialangbuah, serta didistribusikan ke Pusat Pembenihan Ikan Kerasan. Rincian hasil pekerjaan pengadaan pakan benih ikan adalah sebagai berikut :

Tabel Pengadaan Pakan Ikan di Puspik Kerasaan

No	Jenis Pakan	Satuan	Jumlah
1	Pakan Apung 2 mm	Kg	6.600



Gambar 3.9 Pengadaan Pakan Ikan

b. Produksi benih ikan nila

Produksi benih ikan nila dilaksanakan mulai dengan tahapan dari pemijahan induk dan panen larva yang dilaksanakan di puspik kerasaan dan dilanjutkan dengan pendederan di dempon sialangbuah, Produksi benih ikan nila pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Produksi Benih Ikan Tahun 2025

NO	Bulan	Jenis Ikan	Ukuran	Satuan	Jumlah (ekor)
1	Maret	Benih Ikan Nila	1-2 cm	Ekor	50.000
		Benih Ikan Nila	3-5 cm	Ekor	5.000
		Benih Ikan Nila	3-5 cm	Ekor	25.000
2	September	Larva ikan nila	1-2 cm	Ekor	150.000
3	September	Benih Ikan Nila	5-8 cm	Ekor	60.000
4	September	Benih Ikan Nila	3-5 cm	Ekor	50.000
5	Oktober	Benih Ikan Nila	5-8 cm	Ekor	20.000

		Benih Ikan Nila	3-5 cm	Ekor	50.000
		Benih Ikan Nila	2-3 cm	ekor	70.000
		Benih Ikan Nila	3-5 cm	ekor	15.000
		Benih Ikan Nila	8-10 cm	ekor	50.000
6	Desember	Benih Ikan Nila	5-8 cm	ekor	40.000
		Benih Ikan Nila	8-12 cm	ekor	15.600
		Benih Ikan Nila	8-10 cm	ekor	30.000
TOTAL					630.600

C. Produksi Calon Induk

Produksi calon induk dilakukan di Pusat Pembenihan Ikan Nila Kerasaan dengan komoditas nila, lele dan gurami. Adapun produksi calon induk ikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Produksi Calon Induk Ikan Tahun 2025

NO	Jenis Ikan	Jumlah (ekor)
1	Nila	1.200
2	Lele	660
3	Gurami	27
Total		1.887

Faktor Pendukung :

- Ketersediaan benih ikan bermutu dalam jumlah besar
Produksi benih ikan nila sebanyak 630.600 ekor menjamin ketersediaan input utama bagi pembudidaya. Benih berkualitas meningkatkan produktivitas, mempercepat masa panen, dan menekan tingkat kematian, sehingga meningkatkan pendapatan pembudidaya yang berdampak positif pada NTPI.

Faktor Penghambat :

- Kenaikan harga pakan dan benih.
Pakan dan benih merupakan komponen utama dalam biaya produksi budidaya ikan. Kenaikan harga kedua input tersebut menyebabkan biaya operasional meningkat secara signifikan, sementara harga jual hasil budidaya tidak selalu naik secara proporsional. Kondisi ini mengurangi margin keuntungan pembudidaya dan menurunkan daya beli mereka terhadap kebutuhan rumah tangga maupun sarana produksi. Oleh karena itu, kenaikan harga pakan dan benih menjadi penghambat peningkatan Nilai

Tukar Pembudidaya Ikan karena memperlemah keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

- Risiko penyakit dan kematian ikan

Serangan penyakit dan tingginya tingkat kematian ikan dapat menyebabkan kerugian besar bagi pembudidaya. Wabah penyakit sering kali menurunkan produktivitas, kualitas hasil panen, bahkan menyebabkan gagal panen. Selain kehilangan potensi pendapatan, pembudidaya juga harus menanggung biaya tambahan untuk pengobatan, desinfeksi kolam, dan perbaikan sistem budidaya. Kondisi ini mengurangi pendapatan bersih dan menekan kemampuan ekonomi pembudidaya, sehingga menjadi faktor penghambat dalam peningkatan NTPI.

- Fluktuasi harga jual hasil budidaya.

Harga jual hasil budidaya yang tidak stabil dipengaruhi oleh mekanisme pasar, pasokan yang melimpah pada waktu panen bersamaan, serta keterbatasan akses pasar. Ketika harga jual turun, pendapatan pembudidaya tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Fluktuasi harga ini menciptakan ketidakpastian usaha dan mengurangi kemampuan pembudidaya dalam merencanakan produksi maupun investasi. Akibatnya, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan menjadi tertekan karena pendapatan yang diperoleh tidak mampu mengimbangi pengeluaran yang terus meningkat.

Solusi Alternatif yang Dilakukan:

- Penguatan sistem distribusi berbasis sentra

Distribusi benih difokuskan pada wilayah dengan kontribusi produksi tinggi agar dampak terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya lebih signifikan dan langsung berpengaruh pada kenaikan NTPI daerah.

- Pengembangan kemitraan dengan pembudidaya

Membangun pola kemitraan (plasma-inti) antara UPTD dan kelompok pembudidaya untuk menjamin kesinambungan pasokan benih dan pembelian hasil panen, sehingga stabilitas harga di tingkat pembudidaya lebih terjaga.

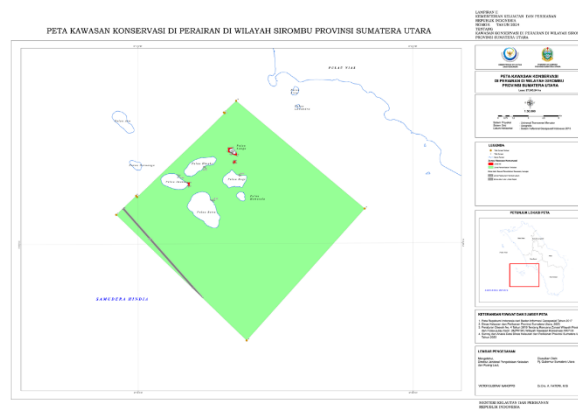
6. Luas Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan

Realisasi luasan kawasan konservasi mencapai 27.343,57 hektar atau 100% dari target. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31 Tahun 2020, kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi ditetapkan dengan kategori taman, suaka, dan kawasan konservasi maritim. Kawasan konservasi untuk kategori taman dan suaka ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan. Sementara kawasan konservasi maritim ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya nasional. Rencana zonasi kawasan konservasi Provinsi Sumatera Utara ditetapkan di Perairan di Wilayah Sirombu Kab. Nias Barat Provinsi Sumatera Utara

Luas pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sirombu Provinsi Sumatera Utara adalah 27.343,57 ha, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Mandrehe
- Sebelah timur : Kecamatan Lölöwa'u
- Sebelah selatan : Kecamatan Lahömi
- Sebelah barat : Samudra Hindia

Rencana zonasi kawasan konservasi ditetapkan berdasarkan karakteristik bio-ekologi, kondisi sosial, ekonomi dan budaya di dalam kawasan. Rencana zonasi ini didukung pula oleh rekomendasi hasil penelitian, studi pustaka, FGD, serta hasil konsultasi publik. Penataan zonasi dilakukan sebagai upaya penataan ruang di dalam kawasan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung dan proses-proses ekologis yang terjadi pada kawasan tersebut. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sirombu Provinsi Sumatera Utara sesuai untuk dikategorikan sebagai Taman yang ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumberdaya ikan dengan ekosistem target yaitu terumbu karang



Gambar 3.10 Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

Zona	Luas Zona (Ha)
Zona Inti	33,33
Zona Pemanfaatan Terbatas	27,082.15
Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan	228,09
Subzona Jalur Lalu Lintas Kapal	227,51
Subzona Pelabuhan/ Tambat Labuh	0,58
Total	27.343,57

Luas Zonasi Terumbu Karang

Zona	Luas	%
Zona Inti	6.86	12.55
Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan	0.02	0.03
Zona Pemanfaatan Terbatas	47.75	87.42
Total	54,47	100

Faktor Pendukung:

- Komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan sumber daya pesisir. Luasan kawasan konservasi perairan di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam melindungi sumber daya pesisir dan laut. Melalui peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah secara konsisten mendorong penetapan, pengelolaan, dan pengawasan kawasan konservasi sebagai bagian dari strategi pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Komitmen ini tercermin dalam perencanaan program, pengalokasian anggaran, serta integrasi kebijakan konservasi dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan adanya keberpihakan kebijakan tersebut,

upaya perlindungan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.

- **Koordinasi lintas sektor yang baik**

Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi yang efektif mempermudah penyelarasan program, pengawasan terpadu, serta penyelesaian potensi konflik pemanfaatan ruang laut. Dengan kolaborasi yang solid, luasan kawasan konservasi tidak hanya menjadi angka administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai kawasan perlindungan ekosistem yang memberikan manfaat ekologis dan ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di Provinsi Sumatera Utara.

Faktor Penghambat:

- **Keterbatasan sumber daya pengawasan.**

Keterbatasan sumber daya pengawasan, baik dari segi jumlah personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggaran, menjadi kendala dalam menjaga dan mengelola kawasan konservasi secara optimal. Pengawasan yang belum maksimal membuka peluang terjadinya aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan yang merusak, perambahan kawasan, dan pemanfaatan sumber daya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini menghambat upaya perluasan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, karena keberhasilan konservasi sangat bergantung pada pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.

- **Potensi konflik pemanfaatan ruang pesisir.**

Kawasan pesisir merupakan ruang yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor, seperti perikanan, pariwisata, transportasi laut, permukiman, dan industri. Tumpang tindih kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir sering menimbulkan konflik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Konflik ini dapat menghambat penetapan maupun perluasan kawasan konservasi, karena adanya penolakan atau keberatan dari pihak

yang merasa akses dan sumber penghidupannya dibatasi. Akibatnya, proses perencanaan dan implementasi kawasan konservasi menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai kesepakatan.

Solusi Alternatif yang Dilakukan:

- Penguatan pengawasan dan pengendalian.
- Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
- Sinkronisasi kebijakan lintas sektor.

7. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mencapai **1,67%** atau 100% dari target yang ditetapkan.

Faktor Pendukung:

- Pertumbuhan produksi perikanan.
- Pengembangan sektor hulu perikanan.

Faktor Penghambat:

- Nilai tambah produk perikanan yang masih rendah.

Sebagian besar produk perikanan masih dipasarkan dalam bentuk segar atau bahan mentah tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Kondisi ini menyebabkan nilai ekonomi yang dihasilkan relatif rendah dibandingkan produk olahan yang memiliki daya saing dan harga jual lebih tinggi. Rendahnya nilai tambah menghambat peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, karena potensi pendapatan daerah dari aktivitas hilirisasi dan diversifikasi produk belum dimanfaatkan secara optimal.

- Terbatasnya industri pengolahan hasil perikanan

Keterbatasan jumlah dan kapasitas industri pengolahan hasil perikanan menyebabkan sebagian besar hasil tangkapan dan budidaya tidak terserap secara maksimal oleh sektor hilir. Minimnya fasilitas pengolahan juga berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja, inovasi produk, dan pengembangan rantai nilai perikanan. Kondisi ini menjadi penghambat karena sektor perikanan belum mampu berkembang secara terintegrasi

dari hulu ke hilir, sehingga kontribusinya terhadap PDRB daerah masih belum optimal.

- **Fluktuasi harga pasar.**

Harga komoditas perikanan yang berfluktuasi dipengaruhi oleh faktor musim, pasokan, permintaan pasar, serta kondisi distribusi. Ketidakstabilan harga menyebabkan pendapatan pelaku usaha perikanan menjadi tidak menentu dan berisiko menurun pada saat harga jatuh. Fluktuasi ini menghambat pertumbuhan sektor perikanan karena pelaku usaha cenderung menahan investasi dan produksi ketika harga tidak stabil. Akibatnya, nilai produksi sektor perikanan yang tercatat dalam PDRB juga mengalami ketidakstabilan dan sulit mengalami peningkatan yang signifikan.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Pengelolaan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilaksanakan secara terpadu dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun pelaporan didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, baik untuk mendukung urusan teknis kelautan dan perikanan maupun fungsi penunjang perangkat daerah.

Secara umum, penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang tercermin dari ketercapaian target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran diarahkan pada kegiatan-kegiatan prioritas, khususnya yang berkaitan

dengan peningkatan produksi perikanan, pengelolaan sumber daya kelautan, pemberdayaan pelaku usaha perikanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Jumlah Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 berjumlah 33.875.408.765 dengan capaian realisasi sebesar 31.680.512.697 atau sekitar 93,77%.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, antara lain adanya keterbatasan fiskal, penyesuaian kebijakan anggaran di tengah tahun, serta dinamika pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penyesuaian waktu dan metode pelaksanaan. Hal tersebut berdampak pada perlunya optimalisasi kembali perencanaan dan penjadwalan kegiatan agar serapan anggaran dapat lebih maksimal.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Ke depan, diperlukan penguatan dalam perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas penganggaran, serta pengawasan yang lebih intensif agar pemanfaatan anggaran semakin efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Selain Dukungan Anggaran, Sumber Daya Manusia juga berperan dalam mencapai target kinerja. Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 163 orang sumber daya manusia, yang terdiri atas 119 Orang PNS, 1 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjin Kerja Paruh Waktu sebanyak 43 Orang. Dengan Komposisi Jumlah Pegawai Laki Laki berjumlah 105 orang dan perempuan

berjumlah 58 orang. Sumber daya manusia tersebut berperan dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam upaya pencapaian tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu melalui adanya pembagian beban kerja Sumber Daya Manusia tersebut dibagi berdasarkan jabatan sebagai berikut :

1. Pejabat Eselon II : 1 Orang
2. Pejabat Eselon III : 10 Orang
3. Pejabat Eselon IV : 16 Orang
4. Pejabat Fungsional : 7 Orang
5. Pelaksana : 85 Orang

Selanjutnya, dari aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan aset daerah telah dilakukan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sarana perkantoran, peralatan kerja, serta fasilitas pendukung kegiatan teknis dimanfaatkan secara efektif dengan mengedepankan prinsip pemeliharaan dan penggunaan bersama antarbidang. Pengelolaan aset juga dilakukan secara tertib dan akuntabel guna menjaga keberlanjutan fungsi serta mencegah terjadinya pemborosan anggaran. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan pada beberapa sarana pendukung teknis yang memerlukan peningkatan atau pembaruan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien dan terintegrasi. Pengelolaan sumber daya tersebut mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang kelautan dan perikanan. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
					%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	395.427	396.610,31	100,29	3.621.474.134	3.398.612.454	93,85
2	Meningkatnya Produktivitas Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	340.000	343.550	101,04	1.853.637.959	1.747.943.636	94,30
		Tingkat Konsumsi Ikan	35,01	35	100	570.062.954	129.768.110	22,76
3	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,35	107,62	106 %	3.621.474.134	3.398.612.454	93,85
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	98	95,39	97,33	1.853.637.959	1.747.943.636	94,30
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir	Luasan Kawasan Konservasi Perairan	27.343,57	27.343,57	100	23.146.000	4.770.000	20,61
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	1,6	1,67	100 %	23.146.000	4.770.000	20,61

Tabel Perbandingan Anggaran sebelum dan sesudah Efisiensi

NO	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG
I	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.104.318.722	387.772.400	(3.716.546.322)
1.1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.540.027.070	364.626.400	(3.175.400.670)
1.1.1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	2.190.146.570	293.084.400	(1.897.062.170)
1.1.2	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.149.960.500	-	(1.149.960.500)
1.1.3	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	199.920.000	71.542.000	(128.378.000)
1.2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	114.344.000	23.146.000	(91.198.000)
1.2.1	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	114.344.000	23.146.000	(91.198.000)
1.3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	449.947.652	-	(449.947.652)
1.3.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan	449.947.652	-	(449.947.652)

	Pulau-Pulau Kecil			
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.419.761.339	3.079.235.000	(13.340.526.339)
2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	9.065.815.339	3.048.605.000	(6.017.210.339)
2.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.497.744.000	2.211.833.000	(3.285.911.000)
2.12	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.568.071.339	836.772.000	(2.731.299.339)
2.2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	7.353.946.000	30.630.000	(7.323.316.000)
2.2.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	7.353.946.000	30.630.000	(7.323.316.000)
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.527.498.755	1.346.367.040	(9.181.131.715)
3.1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	399.785.000	-	(399.785.000)
3.1.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	299.818.000	-	(299.818.000)

3.1.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	99.967.000	-	(99.967.000)
3.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10.127.713.755	1.346.367.040	(8.781.346.715)
3.2.1	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	320.540.420	-	(320.540.420)
3.2.2	Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9.577.861.335	1.346.367.040	(8.231.494.295)
3.2.3	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	229.312.000	-	(229.312.000)
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.354.398.418	424.550.632	(929.847.786)
4.1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	1.154.527.632	391.816.532	(762.711.100)
4.1.1	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	754.631.822	366.006.532	(388.625.290)
4.1.2	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	199.995.000	-	(199.995.000)
4.1.3	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok	199.900.810	25.810.000	(174.090.810)

	Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			
4.2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas	199.870.786	32.734.100	(167.136.686)
4.2.1	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	99.928.950	32.734.100	(67.194.850)
4.2.2	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	99.941.836	-	(99.941.836)
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	245.248.000	295.093.850	49.845.850
5.1	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	245.248.000	295.093.850	49.845.850
5.1.1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	245.248.000	295.093.850	49.845.850

6	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	651.104.253	474.968.754	(176.135.499)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	224.999.998	199.999.650	(25.000.348
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.999.998	199.999.650	(25.000.348
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.999.998	199.999.650	(25.000.348)
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasi Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	426.104.255	274.969.104	(151.135.151)
	Pelaksanaan Pembinaan,Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu	282.235.347	116.305.810	(165.929.537)
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	143.868.908	158.663.294	14.794.386
7	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello	550.000.000	300.000	(250.000.000)

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.000.000	50.000.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	50.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	50.000.000	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	500.000.000	250.000.000	(250.000.000)
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	500.000.000	250.000.000	(250.000.000)
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	500.000.000	250.000.000	(250.000.000)
8	UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai - Asahan	18.701.459.661	438.642.345	(18.262.817.315)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	185.988.588	146.403.211	(39.585.376)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.988.588	146.403.211	(39.585.376)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.988.588	146.403.211	(39.585.376)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			

	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	350.857.367	-	(350.857.367)
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	18.164.613.706	292.239.134	(17.872.374.572)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	18.164.613.706	292.239.134	(17.872.374.572)
9	UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	4.099.836.617	717.270.919	(3.382.565.698)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	160.000.000	210.000.000	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	210.000.000	50.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000	210.000.000	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.939.836.617	507.270.919	(3.432.565.698)
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	2.636.990.317	390.720.919	(2.246.269.398)
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.659.996.685	-	(1.659.996.685)
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan	976.993.632	390.720.919	(586.272.713)

	Ikan di Laut			
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.302.846.300	116.550.000	1.186.296.300
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.302.846.300	116.550.000	1.186.296.300

Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Utara pada tahun 2025 diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Kampung	1	M2		-	-	1
2	Tambak Lainnya	2	M2		-	-	2
3	Kolam Air Tawar	7	M2		-	-	7
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	5	M2		-	-	5
5	Tanah Bangunan Rumah Tanpa Golongan	1	M2		-	-	1
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	M2		-	-	7
7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1	M2		-	-	1
8	Tanah Bangunan Laboratorium	3	M2		-	-	3
9	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	9	M2		-	-	9
10	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	M2		-	-	1
11	Tractor Lain-lain	1	Unit		-	-	1
12	Alat Pengangkat Lainnya	3	Unit		-	-	3
13	Pompa Lain-lain	7	Unit		-	-	7
14	Jeep	1	Unit		-	-	1
15	Staion Wagon	10	Unit		-	-	10
16	Micro Bus (Penumpang 15-30 org)	1	Unit		-	-	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
17	Mini Bus (Penumpang 14 Org ke bawah)	2	Unit		–	-	2
18	Pick Up	2	Unit	–		-	2
19	Sepeda Motor	12	Unit	–	–	–	12
20	Kapal Motor	1	Unit		–	-	1
21	Speed Boat	3	Unit		–	–	3
22	Motor Boat	2	Unit		–	–	2
23	Kapal Patroli Pantai	3	Unit		–	-	3
24	Alat Angkut Apung Bermotor khusus Lain-lain	2	Unit		–	-	2
25	Mesin Bubut	3	Unit		–	-	3
26	Mesin Press	1	Unit		–	–	1
27	Mesin Bor	1	Unit		–	–	1
28	Mesin Gerinda Tangan	1	Unit		–	–	1
29	Mesin Gerinda	1	Unit		–	–	1
30	Mesin Rol	1	Unit		–	–	1
31	Mesin Bor Cylinder	2	Unit		–	-	2
32	Mesin Kompresor	2	Unit		–	–	2
33	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	64	Unit		–	–	64
34	Bateray Charger	6	Unit		–	-	6
35	Perkakas Bengkel Lain-lain	170	Unit		–	–	170
36	Lubricating Equipment	6	Unit		–	-	6
37	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	144	Unit		–	–	144
38	Mesin Bor	1	Unit	97	–	–	1
39	Peralatan Las Karbit	2	Unit		–	–	2
40	Peralatan Las Lain-lain	122	Unit		–	–	122
41	Perkakas Parik Es Lain-lain	15	Unit		–	–	15
42	Perkakas Pemotong Plat	2	Unit		–	–	2
43	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain	406	Unit		–	–	406
44	Tool Kit Set	6	Unit		–	–	6
45	Kunci Momet	2	Unit		–	–	2

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
46	Perkakas Standar Lain-lain	50	Unit		–	–	50
47	Perkakas Khusus Lain-lain	2	Unit		–	–	2
48	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	13	Unit		–	-	13
49	Guting Plat	3	Unit		–		3
50	Kunci Pas 1 set	1	Unit		–	-	1
51	Jangka Berkala	2	Unit		–	-	2
52	pH Meter	1	Unit		–	-	1
53	Global Positioning System (GPS)	42	Unit		–	-	42
54	Alat Ukur Universal Lain-lain	2	Unit		–	-	2
55	Universal Tester Lain-lain	1	Unit		–	-	1
56	Thermometer Standar	6	Unit		–	-	6
57	Alat Ukur/pembanding lain-lain	80	Unit		–	-	80
58	Alat Pengukur Garis Tengah	40	Unit		–	-	40
59	Alat Ukur Lainnya (lain-lain)	105	Unit		–	-	105
60	Alat Timbangan Lain-lain	2	Unit		–	-	2
61	Pacul	10	buah		–	-	10
62	Ember Plastik	35	buah		–	-	35
63	Alat panen lain-lain	8	Unit		–	-	8
64	Rak Penyimpanan	1	Unit		–	-	1
65	Alat Penyimpanan hasil Percobaan Lain-lain	3	Unit		–	-	3
66	Alat Pengukur pH Tanah/ soil Tanah	1	buah		–	-	1
67	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	4	buah		98	-	4
68	Alat Processing lain-lain	252	buah		–	-	252
69	Set Gillnet/Jaring Insang Tetap	1	set		–	-	1
70	Jaring Angkat Lainnya	34	set		–	-	34
71	Pancing lainnya	1	set		–	-	1
72	Bak Pemeliharaan Sementara	4	Unit		–	-	4
73	Keramba/Jaring Apung	16	Unit		–	-	16
74	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	2958	Unit		–	-	2958

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
75	Arit	30	buah		–	-	30
76	Penyemprot Mesin/Power Sprayer	14	buah		–	-	14
77	Alat Pemeliharaan dan lain-lain	22	buah		–	-	22
78	Alat penangkapan Ikan Lain-lain	41	buah		–	-	41
79	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	33	Unit		–	-	33
80	Mesin Ketik Longe Wagen (18)	13	Unit		–	-	13
81	Mesin Hitung Elektronik	13	Unit		–	-	13
83	Mesin Absen/Time Recorder	6	Unit		–	-	6
84	Kalkulator	13	Unit		–	-	13
85	Mesin Fotocopy kertas Biasa (double folio)	3	Unit		–	-	3
86	Lemari Es	17	Unit		–	-	17
87	Rak Besi/Metal	2	Unit		–	-	2
88	Rak Kayu	19	Unit		–	-	19
89	Filling Besi/Metal	99	Unit		–	-	99
90	Filling Kayu	7	Unit		–	-	7
91	Brankas	13	Unit		–	-	13
92	Peti Uang	1	Unit		–	-	1
93	Lemari Kaca	14	Unit		–		14
94	Lemari Makan	4	Unit		–	-	4
95	Lemari Kayu	29	Unit		–	-	29
96	Alat Penghancur Kertas	35	Unit		–	30	5
97	Papan Nama Instansi	20	Unit		–	-	20
98	Papan Pengumuman	186	Unit		–	-	186
99	Papan Tulis	7	buah		–	-	7
100	White Board	11	buah		–	-	11
101	Peta	9	buah		–	-	9
102	Alat Penghancur Kertas	61	buah		–	-	61
103	Overhead Proyektor	5	Unit		–	-	5
104	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	495	Unit		–	-	495

105	Genset	11	Unit		–	-	11
106	Mesin Pompa Air PMK	16	Unit		–	-	16
107	Lemari Kayu	27	Unit		–	-	27
108	Meja Kayu/Rotan	77	buah		–	-	77
109	Kursi Besi/Metal	50	buah		–	-	50
110	Tempat Tidur Kayu	144	Unit		–	-	144
111	Meja Rapat	74	buah		–	50	24
112	Meja Tulis	152	buah		–	-	152
113	Meja Makan	24	buah		–	-	24
114	Meja Podium	5	buah		–	-	5
115	Meja Ketik	2	buah		–	-	2
116	Meja Panjang	12	buah		–	-	12
117	Kursi Rapat	207	buah		–	-	207
118	Kursi Tamu	18	buah		–	-	18
119	Kursi Putar	172	buah		–	-	172
120	Bangku Tunggu	4	buah		–	-	4
121	Kursi Lipat	279	buah		–	-	279
122	Meja Komputer	13	buah		–	-	13
123	Kasur/spring bed	147	buah		–	-	147
124	Bantal	64	buah		–	-	64
125	Guling	46	buah		–	-	46
126	Seprei	6	buah		–	-	6
127	Sofa	13	buah		–	-	13
128	Lemari pakaian	56	buah		–	-	56
129	lemari Rias	3	buah		–	-	3
130	Kursi Plastik	348	buah		10	-	348
131	Tempat Tidur Springbed	42	set		–	-	42
132	Kursi Tulis	27	buah		–	-	27
133	Kursi Kerja	25	buah		–	-	25
134	Gordyn	3	buah		–	-	3
135	Meja baca	10	buah		–	-	10

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
136	Karpet	30	buah		–	-	30
137	Kursi Teras	1	buah		–	-	1
138	Jam Elektronik	8	Unit		–	-	8
139	Mesin Potong Rumput	19	Unit		–	-	19
140	Lemari Es	17	Unit		–	-	17
141	A.C. Window	35	Unit		–	-	35
142	Ac Split	131	Unit		–	-	131
143	Kipas Angin	6	Unit		–	-	6
144	Exhause Fan	17	Unit		–	-	17
145	Alat Pendingan Lain-lain	12	Unit		–	-	12
146	Kompore Gas	5	Unit		–	-	5
147	Tabung Gas	1	Unit		–	-	1
148	Dipenser	439	Unit		–	-	439
150	Rice Cooker	5	Unit		–	-	5
151	Rak Piring Alumunium	1	Unit		–	-	1
152	Alat pemanas	2	Unit		–	-	2
153	Televisi	33	Unit		–	-	33
154	Amplifier	9	Unit		–	-	9
155	Loudspeaker	4	Unit		–	-	4
156	Sound System	22	Unit		–	-	22
157	Camera Video Digital	6	Unit		–	-	6
158	Camera Film	4	Unit		–	-	4
159	Aquarium	6	Unit		10	-	6
160	Mimbar/Podium	1	buah		–	-	1
161	handycam	16	Unit		–	-	16
162	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Home Use) Lain-lain	499	Unit		–	-	499
163	Lampu Hias	5	Unit		–	-	5
164	Alat Pemadam Kebakaran	26	Unit		–	-	26
165	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	7	Unit		–	-	7

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
166	Lampu Sorot	2	Unit		–	-	2
167	Lampu	16	Unit		–	-	16
168	P.C Unit	148	Unit		–	-	148
169	Laptop	87	Unit		–	-	87
170	Notebook	77	Unit		–	-	77
171	Personal Computer	17	Unit		–	-	17
172	CPU	1	Unit		–	-	1
173	Perlatan Komputer Mainframe	1	Unit		–	-	1
174	Printer	211	Unit		–	-	211
175	Kompas	1	Unit		–	-	1
176	Amplifier	10	Unit		–	-	10
177	Microphone	18	Unit		–	-	18
178	Speaker	4	buah		–	-	4
179	megaphone	2	buah		–	-	2
180	Soundssystem	68	Unit		–	-	68
181	Telephone (PABX)	1	Unit		–	-	1
182	Handy Talk	17	Unit		–	-	17
183	Faximilie	2	Unit		–	-	2
184	Handphone	8	Unit		–	-	8
185	Alat Komunikasi Lain-lain	166	Unit		–	-	166
186	Unit Transceiver SSB Transportable	3	Unit		–	-	3
187	Alat Komunikasi Radio SSb lain-lain	79	Unit		–	-	79
188	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	4	Unit		10	-	4
189	Alat Komunikasi Lain-lain	8	Unit		–	-	8
190	Peralatan Antena VHF/FM lain-lain	3	Unit		–	-	3
191	Peralatan Antena SHF/Parabola lain-lain	5	Unit		–	-	5
192	Switcher/Menara antenna lain-lain	1	Unit		–	-	1
193	Program Input Equipment lain-lain	2	Unit		–	-	2
194	Tabung Oksigen	3	Unit		–	-	3

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
195	Alat Kesehatan Olah Raga lain-lain	1	Unit		–	-	1
196	Spektrofotometer	1	Unit		–	-	1
197	Incubator	1	Unit		–	-	1
198	Alat Laboratorium Microbiologi Lain-lain	12	Unit		–	-	12
199	Microscope dengan Camera	1	Unit		–	-	1
200	Water Test	2	Unit		–	-	2
201	D O Meter	1	Unit		–	-	1
202	Tools	303	Unit		–	-	303
203	Alat Lab Model/Hidrolika lain-lain	10	Unit		–	-	10
204	Mortar	6	Unit		–	-	6
205	pH Meter	2	Unit		–	-	2
206	Burret dan Standres	2	Unit		–	-	2
207	Refractometer	30	Unit		–	-	30
208	Microscope Binacular	1	Unit		–	-	1
209	Dry Oven	1	Unit		–	-	1
210	Alat Kedokteran Umum Lain	1665	Unit		–	-	1665
211	Incubator	2	Unit		–	-	2
212	Tabung Reaksi	150	Unit		–	-	150
213	Autoclave	1	Unit		–	-	1
214	Timbangan	2	Unit		–	-	2
215	DOD Meter	1	Unit		–	-	1
216	Furnace	1	Unit		–	-	1
217	Centrifuge	4	buah		10 –	-	4
218	Water Bath	1	buah		–	-	1
219	Alat Laboratorium Kedokteran Lain-lain	8	Unit		–	-	8
220	pH Meter	1	Unit		–	-	1
221	Destilator	10	buah		–	-	10
222	Aquabidest Aparatus	100			–	-	100
223	Hot Plate	5	buah		–	-	5

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
224	TV Monitor	1	Unit		–		1
225	Alat Laboratorium Kimia Lain-lain	9	Unit		–		9
226	Alat Lab Mikrobiologi A Lain-lain	9	Unit		–	-	9
227	Protein Analyzer	2	Unit		–	-	2
228	Alat Lab Standardisasi, Kalibrasi lain-lain	1	Unit		–	-	1
229	Heater	1	Unit		–	-	1
230	Exhaust Fan	1	Unit		–	-	1
231	Alat Lab Proses Teknologi Keramik lain-lain	5	Unit		–	-	5
232	Alat Lab Pertanian lain-lain	28	Unit		–	-	28
233	High Performance Liquid Chromatography	2	Unit		–	-	2
234	Stomacher	1	Unit		–	-	1
235	Tissue Block	300	buah		–	-	300
236	Alat Pertanian B Lain-lain	5	buah		–	-	5
237	Echo sounder	1	Unit		–	-	1
238	Lux Metre	4	buah		–	-	4
239	Alat Lab Lingkungan Perairan Lain-lain	6	buah		–	-	6
240	Refractometer	4	buah		–	-	4
241	Under water camera	2	buah		–	-	2
242	Alat Selam	200	Unit		–	-	200
243	Dissecting Apparatus (Alat Laboratorium Biologi Perairan)	8	buah		– 10	-	8
244	Alat Lab Biologi Peralatan lain-lain	30	buah		–	-	30
245	Alat Perakut Aluminium foil	2	buah		–	-	2
246	Alat Lab Biologi lain-lain	150	buah		–	-	150
247	Alat Lab Proses Teknik Kimia lain-lain	4	Unit		–	-	4
248	Petri Dishes lain-lain	300	buah		–	-	300
249	Alat Lab Kerasipan lain-lain	28	buah		–	-	28
250	Detector HPLC	1	buah		–	-	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
251	Tabung Reaksi	150	buah		–	-	150
252	Mistar	2	buah		–	-	2
253	Gelas Ukur	3	buah		–	-	3
254	Ember/Pot	30	buah		–	-	30
255	Thermometer 0.0-100.0 C	8	buah		–	-	8
256	Pemberat	150	buah		–	-	150
257	Kapas Kertas yang Kering	3	buah		–	-	3
258	Gelas Piala	1	buah		–	-	1
259	Microscope	7	buah		–	-	7
260	Thermo Couple	1	buah		–	-	1
261	pH Meter/Indicator N ion water	1	buah		–	-	1
262	Vacuu Meter	2	buah		–	-	2
263	General Laboratory tools dan lain-lain	3	buah		–	-	3
264	Hotplate	2	buah		–	-	2
265	Heating Mantle	2	buah		–	-	2
266	DO Meter	2	buah		–	-	2
267	Water Quality Analyzer System	3	buah		–	-	3
268	Plankton Net	4	buah		–	-	4
269	Alat Lab Kualitas Air dan tanah lain-lain	38	buah		–	-	38
270	Blender	2	buah		–	-	2
271	Alat Lab Lingkungan lain-lain	34	buah		–	-	34
272	Centrifuge	69	buah		10	-	69
273	Water Circulation Bath	1	buah		–	-	1
274	Refrigerator/Freezer	4	Unit		–	-	4
275	Alat Lab Penunjang lain-lain	4382	buah		–	-	4382
276	Temperatur Measuring Instrument	1	Unit		–	-	1
277	Workshop Accessories	1	Unit		–	-	1
278	Coloumn Drilling Machine	2	Unit		–	-	2
279	Senjata lain-lain	1	buah		–	-	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
280	CCTV	6	buah		–	-	6
281	Lampu Serene tunggal	1	buah		–	-	1
282	Radar Kapal laut	1	buah		–	-	1
283	Alat Perlindungan lain-lain	6	buah		–	-	6
284	Bangunan Gedung Kantor Permanen	13	Unit		–	-	13
285	Bangunan Kantor lain-lain	3	Unit		–	-	3
286	Bangunan Gudang lain-lain	3	Unit		–	-	3
287	Bangunan Gudang untuk Bengkel lain-lain	1	Unit		–	-	1
288	Bangunan gedung instalasi Permanen	2	Unit		–	-	2
289	Bangunan gedung instalasi lain-lain	1	Unit		–	-	1
290	Bangunan Gedung Lab Permanen	2	Unit		–	-	2
291	Bangunan Tempat Pertemuan lain-lain	1	Unit		–	-	1
292	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1	Unit		–	-	1
293	Bangunan Gedung olah raga terbuka semi permanen	1	Unit		–	-	1
294	Gedung Pos Jaga Permanen	12	Unit		–	-	12
295	Bangunan gedung untuk pos jaga lain-lain	1	Unit		–	-	1
296	Bangunan Gedung garasi/pool lain-lain	2	Unit		–	-	2
297	Bangunan tempat kerja lain	3	Unit		–	-	3
298	Konstruksi Pagar	8	Unit		–	-	8
299	Rumah Negara Gol 1 tipe A Permanen	1	Unit		10	-	1
300	Rumah Negara Gol 1 tipe B Permanen	1	Unit		–	-	1
301	Rumah Negara Gol 1 tipe C Permanen	3	Unit		–	-	3
302	Rumah Negara Gol 1 tipe D Permanen	2	Unit		–	-	2
303	Rumah Negara Gol II tipe A Permanen	1	Unit		–	-	1
304	Rumah Negara Gol II tipe A Semi Permanen	1	Unit		–	-	1
305	Rumah Negara Gol II tipe E Semi Permanen	1	Unit		–	-	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
306	Rumah Negara Gol III tipe D Permanen	8	Unit		–	-	8
307	Asrama Permanen	1	Unit		–	-	1
308	Jalan Desa lain-lain	4			–	-	4
309	Jalan Khusus	4			–	-	4
310	Bangunan Pengambilan irigasi lain-lain	2	Unit		–	-	2
311	Bangunan Pembawa Irigasi lain-lain	5	Unit		–	-	5
312	Bangunan Pengaman Irigasi lain-lain	2	Unit		–	-	2
313	Bangunan Pembuang Pengaman sungai lain-lain	3	Unit		–	-	3
314	Bak Penampung Kolam Ukur	4	Unit		–	-	4
315	Bangunan Pengaman Pengembangan lain-lain	1	Unit		–	-	1
316	Bangunan Gorong-gorong	1	Unit		–	-	1
317	Bangunan Menara atau Bak	1	Unit		–	-	1
318	lain-lain	1	Unit		–	-	1
319	Instalasi Air bersih lain-lain	4	Unit		–	-	4
320	Instalasi buang air pertanian kapasitas kecil	1	Unit		–	-	1
321	Instalasi buang air pertanian kapasitas lain-lain	1	Unit		–	-	1
322	Pembangkit listri tenaga diesel lain-lain	1	Unit		–	-	1
323	Instalasi gardu listrik distribusi lain-lain	3	Unit		–	-	3
324	Instalasi Pusat Pengatur listrik lain-lain	6	Unit		–	-	6
325	Instalasi	5	Unit		–	-	5
326	lain-lain	1	Unit		–	-	1
327	Ilmu Pengetahuan umum	21			–	-	21
328	Hukum	10			–	-	10
329	Buku Ilmu Sosial lain-lain	10	buah		–	-	10
330	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis lain-lain	20	buah		–	-	20
331	Buku laporan penelitian	2	buah		–	-	2

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
332	Peta lain-lain	100	buah		–	-	100
333	Maket dan Foto Dokumen lain-lain	3	buah		–	-	3
334	Barang kerajinan lain-lain	1	buah		–	-	1
335	Induk Ikan Kerapu	30	ekor		–	-	30
336	Induk Ikan Mas	933	ekor		–	-	933
337	Binatang Ikan lain-lain	137.256	ekor		–	-	137.256
338	Aset Tetap renovasi	12	Unit		–	-	12
339	Perangkat lunak system operasi	7	Unit		–		7
340	Jalan khusus lainnya	2	Lokasi		–	-	2
341	Dermaga	2	Lokasi		–	-	2
342	Pembangunan pintu air/klep	1	Lokasi		–	-	1
343	Bangunan penguat tebing	2	Lokasi		–	-	2
344	Bangunan pengambilan pengembangan sumber air	4	Lokasi		–	-	4
345	Sumur artesis	5	Lokasi		–	-	5
346	Bangunan pelengkap air koto standar	1	Lokasi		–	-	1
347	Instalasi air tanah dalam kapasitas sedang	1	Lokasi		–	-	1
348	Instalasi air tanah dangkal	1	Lokasi		–	-	1
349	Sumur resapan	4	Lokasi		–	-	4
350	Instalasi gardu induk standar	3	Unit		–	-	3
351	Instalasi air buangan pertanian	1	Unit		–	-	1
352	Instalasi gardu listrik induk kapasitas sedang	2	Unit		–	-	2
353	Instalasi pengaman penangkal petir	1	Unit		10	-	1
354	Jaringan distribusi tegangandibawah 1 KVA	1	Unit		–	-	1
355	Bangunan gedung kantor permanen standar	9	Lokasi		–	-	9
356	Bangunan gudang tertutup permanen	4	Lokasi		–	-	4
357	Bangunan gudang tertutup semi permanen	1	Lokasi		–	-	1
358	Bangunan tempat kerja standar	19	Lokasi		–	-	19

359	Bangunan tempat parkir	1	Lokasi		–	-	1
360	Taman permanen	1	Lokasi		–	-	1
361	Tugu pembangunan	3	Lokasi		–	-	3
362	Bangunan gapura	1	Lokasi		–	-	1
363	Pagar permanen	1	Lokasi		–	-	1
364	Bangunan plank Instansi	1	Lokasi		–	-	1
365	Tanah tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	11	Lokasi		–	-	11
366	Crawler Excavator + Attachment	1	Unit		–	-	
367	Alat pengangkat lain-lain	3	Unit		–	-	
368	Mesin pembuat pellet	3	Unit		–	-	3
369	Water Treatment (mesin proses)	11	Unit		–	11	–
370	Fender dampira kapal	4	Unit		–	4	–
371	Portable Generating Set	3	Unit		–	3	–
372	Stationnary Generating Set	2	Unit		–	–	2
373	Pompa Air	13	Unit		–	3	10
374	Mesin bor batu	1	Unit		–	–	1
375	Multi purpose vehicle (MPV)	9	Unit		–	6	3
376	Sport Utility Vehicle (SUV)	3	Unit		–	–	3
377	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-lain	1	Unit		–	–	1
378	Baggage Trolley	6	Unit		–	6	–
379	Kreta sorong	10	Unit		–	–	10
380	Alat Angkut Apung Penumpang Lain-lain	178	Unit		–	–	178
381	Kapal Pengawas Perikanan	1	Unit		–	1	–
382	Mesin Frais	1	Unit		10	–	1
383	Perkakas Bengkel Listrik Lin-lain	194	Buah		–	–	194
384	Lubriacating Equipment	6	Unit		–	–	6
385	Mesin gergaji	2	Unit		–	–	2
386	Mesin Bor Kayu	1	Unit		–	–	1
387	Perkakas Bengkel Khusus Lin-lain	3	Buah		–	–	3
388	Peralatan Las Listrik	6	Unit		–	–	6
389	Perkakas pabrik Es Lin-lain	15	Unit		–	–	15
390	Perkakas pengukur	8	Unit		–	–	8
391	Dongkrak mekanik	1	Unit		–	–	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
392	Kunci moment	2	Unit		–	–	2
393	Kunci Khusus Alat Angkut Apung	1	Unit		–	–	1
394	Gunting Plat	3	Buah		–	–	3
395	Jangka Berkaki	2	Unit		–	–	2
396	Peralatan Ukur, Gip & Feting Lain-lain	1	Unit		–	–	1
397	Peralatan Bengkel Lainnya	1	Unit		–	–	1
398	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1	Unit		–	–	1
399	Scanner (Universal Tester)	1	Unit		–	–	1
400	Termometer Standar	5	Unit		–	–	5
401	Alat Pemeriksaan Timbangan Tekanan Beroda	10	Unit		–	–	10
402	Alat Pengukur Garis Tengah	40	Unit		–	–	40
403	Technical Toolkit	1	Unit		–	–	1
404	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	1	Unit		–	–	1
405	Gerobak Sorong (Alat Pertanian)	4	Unit		–	–	4
406	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	22	Unit		–	–	22
407	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	1	Buah		–	–	1
408	Mesin Penepung Beras	2	Unit		–	–	2
409	CCTV - Camera Control Television System	9	Unit		–	–	9
410	Laser Pointer	4	Unit		–	–	4
411	Lampu-lampu Kristal	5	Unit		–	–	5
412	LCD Projector/Infocus	2	Unit		11	–	2
413	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	4	Unit		–	–	4
414	Papan Gambar	1	Buah		–	–	1
415	Papan Nama Instansi	186	Buah		–	–	186
416	Perkakas Kantor	421	Buah		–	–	421
417	Meja Kerja Kayu	77	Unit		–	–	77
418	Kursi Kayu	11	Unit		–	–	11
419	Meja 1/2 Biro	10	Unit		–	–	10
420	Meubelair Lain-lain	2	Unit		–	–	2

	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
421	Meja Kerja Staf	123	Unit		–	–	123
422	Jam Mekanis	10	Buah		–	–	10
423	Alat Pembersih Lain-lain	3	Buah		–	–	3
424	Cold Storage (Alat Pendingin)	14	Unit		–	–	14
425	Vertikal Blind	2	Buah		–	–	2
426	Gordyin/Kray	3	Buah		–	–	3
427	Asesorris Rumah Tangga	5	Buah		–	–	5
428	Topeng (masker) Oxigen	4	Buah		–	–	4
429	Alat Pembantu Kebakaran	10	Unit		–	–	10
430	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit		-	1	-
431	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Unit		–	–	7
432	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	92	Unit		–	–	92
433	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	72	Unit		–	–	72
434	Meja Tamu Biasa	5	Unit		–	–	5
435	Meja Operator	2	Unit		–	–	2
436	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	Unit		–	–	1
437	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	Unit			2	2
438	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit		–	–	5
439	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Unit		–	–	10
440	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	10	Unit		–	–	10
441	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	121	Unit		-	100	21
442	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	65	Unit		-	60	5
443	Kursi Rapat Ruangan Data	2	Unit		11	2	-
444	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	18	Unit		–	–	18
445	Buffet Kayu	2	Unit		–	–	2
446	Disc Record Player	1	Unit		–	–	1
447	Microphone Connector Box	9	Unit		–	–	9
448	Uninterruptible Power Supply (UPS)	25	Unit		–	–	25
449	Peralatan studio Visual Lain-lain	41	Unit		–	–	41
450	Camera+Attachmen	11	Unit		–	–	11

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
451	Camera Electronic	28	Unit		–	–	28
452	Video Hum Compensator	1	Unit		–	–	1
453	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	3	Unit		–	–	3
454	Tripod Camera	1	Unit		–	–	1
455	Slide Projector	1	Unit		–	–	1
456	Layar Film/Projector	8	Unit		–	–	8
457	Camera Under Water	2	Unit		–	–	2
458	Camera Digital	1	Unit		–	–	1
459	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	26	Unit		–	–	26
460	infocus Projector	1	Unit		–	–	1
461	Printer (Pencetak Photo)	15	Unit		–	–	15
462	Teropong/Keker	1	Unit		–	–	1
463	Kompas Elektrik	1	Unit		–	–	1
464	Microphine	18	Unit		–	15	3
465	Loudspeker Studio	23	Unit		–	15	8
466	Megaphone	2	Unit		–	-	2
467	Sound System	64	Unit		–	30	34
468	Pesawat Telephone	1	Unit		–	–	1
469	Handy Talkiy (HT)	17	Unit		–	7	10
470	Facsimile	2	Unit		–	–	2
471	Unit Tranceiver Ssb Transportable	3	Unit		–	–	3
472	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	8	Unit		–	–	8
473	Mainframe (Alat Komunikasi Khusus)	1	Unit		11	–	1
474	Antena MF/MW	1	Unit		–	–	1
475	Basic Diagnostic Kit (Alat Kedokteran Umum)	1662	Unit		–	–	1662
476	Mouth Piece	5	Unit		–	5	-
477	Incubator Standar	1	Unit		–	–	1
478	Treat Mill	1	Unit		–	–	1
479	Spectro Photo Meter	1	Unit		–	–	1

480	Mantel Destilasi	6	Unit		–	–	6
481	Mobile Laboratorium Set	6	Unit		–	–	6
482	Analytical Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	63	Unit		–	–	63
483	Mixer	1	Unit		–	–	1
484	Drying Oven	1	Unit		–	–	1
485	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	4	Unit		–	–	4
486	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit		–	–	2
487	Mortar (Alat Laboratorium Umum)	6	Unit		–	–	6
488	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit		–	–	1
489	Timbangan/Neraca	2	Unit		–	–	2
490	B O D Meter	1	Unit		–	–	1
491	Furnace	1	Unit		–	–	1
492	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	Buah		–	–	1
493	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit		–	–	2
494	Alat Laboratorium Umum Lain-lain	64	Unit		–	–	64
495	Bejana	150	Buah		–	–	150
496	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	12	Unit		–	–	12
497	Sentrifuge Untuk Microplate	5	Unit		–	–	5
498	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	3	Unit		–	–	3
499	Water Bth	1	Unit		–	–	1
500	Turbidimeter (Alat Laboratorium Kimia)	3	Unit		–	–	3
501	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	10	Unit		–	–	10
502	Aqua Bidest Apparatus	100	Unit		11	–	100
503	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	5	Unit		–	–	5
504	Mini Mil Computerized Laboratory Digester	1	Unit		–	–	1
505	Automatic Dispencer	10	Unit		–	–	10
506	Timer (Alat Laboratorium Hematologi)	8	Unit		–	–	8
507	Alat Pemanas	2	Unit		–	–	2
508	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	5	Unit		–	–	5
509	Power Supply (Alat Laboratorium Fisika)	1	Unit		–	–	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
510	Heater (Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam)	1	Unit		–	–	1
511	Exhaust Fan	1	Unit		–	–	1
512	Alat Lab. Proses Teknologi Keramik Lain-Lain	4	Unit		–	–	4
513	Alat Lab. Proses Teknologi Kulit Karet Lain-Lain	1	Unit		–	–	1
514	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) (Alat Lab. Pertanian)	1	Unit		–	–	1
515	High Performace Liquid Chromatography (HPLC)	2	Unit		–	–	2
516	Muffle Furnace	1	Unit		–	1	
517	Stabilizer/UPS	6	Unit		–	2	4
518	Vacum Tester	27	Buah		–	–	27
519	Echo Sounder (Alat Laboratorium Oceanografi)	1	Buah		–	–	1
520	Radio Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)	6	Buah		–	–	6

3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	Sasaran Strategis	Inidikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
1	Meningkatnya Produktifitas Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	395.427 (Ton / Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	100	Menunjang	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan			

				Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya kegiatan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi			
2	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Meningkatnya a Produksi Perikanan Budidaya	395.427 (Ton / Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	100	Menunjang	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			
3	Meningkatnya	Nilai Tukar	107,62	PROGRAM	Meningkatnya	100	Menunjang	

	Kesejahteraan Nelayan	Nelayan (NTN)		PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya kegiatan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan			

					perikanan provinsi			
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	95,39	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	100	Menunjang	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			
		Angka Konsumsi Ikan	35,01	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	90	Menunjang	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran			

					Skala Menengah dan Besar			
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir	Luasan Kawasan Konsevasi Pesisir dan Perairan	27.343,57	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)	96	Menunjang	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang	Terkelolanya Bentuk			

				Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Perizinan Pengelolaan Ruang Laut 0 sampai 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Dokumen)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta realisasi anggaran per Program Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dapat terlihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 Tingkat Capaian anggaran berdasarkan
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1. Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan 2. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	387.772.400	271.067.400	69,90%
	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		364.626.400	266.297.400	73,03%
	Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		23.146.000	4.770.000	20,61%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1. Produksi Perikanan Tangkap 2. Nilai Tukar Nelayan	3.621.474.134	3.398.612.454	93,85%
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		3.048.605.000	2.988.655.654	98,03%
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		30.630.000	30.426.000	99,33%
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		542.239.134	379.530.800	69,99%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Produksi Perikanan Budidaya	1.853.637.959	1.747.943.636	94,30%
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		1.737.087.959	1.634.723.636	94,11%

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	116.550.000	113.220.000	97,14%
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	570.062.954	129.768.110	22,76%
	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		274.969.104	82.530.559	30,01%
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		295.093.850	47.237.551	16,01%

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	387.772.400	271.067.400	69,90%
2.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	364.626.400	266.297.400	73,03%
2.1.01.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	293.084.400	240.442.400	82,04%
2.1.01.3	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	71.542.000	25.855.000	36,14%
2.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	23.146.000	4.770.000	20,61%
2.1.02.2	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	23.146.000	4.770.000	20,61%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.621.474.134	3.398.612.454	93,85%
3.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah	3.048.605.000	2.988.655.654	98,03%

	Laut Sampai Dengan 12 Mil			
3.1.01.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.211.833.000	2.175.470.204	98,36%
3.1.01.3	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	836.772.000	813.185.450	97,18%
3.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30.630.000	30.426.000	99,33%
3.1.02.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	30.630.000	30.426.000	99,33%
3.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	542.239.134	379.530.800	69,99%
3.1.06.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	292.239.134	164.597.645	56,32%
3.1.06.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	250.000.000	214.933.155	85,97%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	9.952.456.101	9.277.037.874,43	93,21

4.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.737.087.959	1.634.723.636	94,11%
4.1.05.4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	390.720.919	386.508.300	98,92%
4.1.05.9	Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.346.367.040	1.248.215.336	92,71%
4.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	116.550.000	113.220.000	97,14%
4.1.06.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	116.550.000	113.220.000	97,14%
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	424.550.632	377.078.710	88,82%
5.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	391.816.532	344.356.610	87,89%
5.1.01.2	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	366.006.532	322.642.610	88,15%

5.1.01.4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	25.810.000	21.714.000	84,13%
5.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas	32.734.100	32.722.100	99,96%
5.1.02.3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.734.100	32.722.100	99,96%
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	570.062.954	129.768.110	22,76%
6.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Penetapan Persyaratan dan Prosedur	47.006.000	43.506.000	92,55

6.1.01.1	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	47.006.000	43.506.000	92,55
6.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	274.969.104	82.530.559	30,01%
6.1.02.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	158.663.294	99.376.369	62,63%
6.1.02.2	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	116.305.810	67.007.000	57,61%
6.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	295.093.850	47.237.551	16,01%

	Provinsi			
6.1.03.1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	295.093.850	47.237.551	16,01%
	<u>TOTAL</u>	33.875.408.765	31.680.512.697	93,77%.

Sumber : *Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu*

Uraian penjelasan tabel:

Dari anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 33.875.408.765,- dengan realisasi Rp. 31.680.512.697,- dengan tingkat capaian sebesar 93,77 %, berarti capaian realisasi anggaran telah mencapai tingkat maksimal sebesar Rp. 31.680.512.697.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Target dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap mencapai realisasi 396.610,31 Ton dari 395.427 Ton Target yang ditetapkan atau sebesar 100,29 %
2. Indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya mencapai realisasi 343.550 Ton dari Target sebesar 340.000 atau 101,04 %
3. Indikator Tingkat Konsumsi Ikan mencapai target 100 % yaitu 35 Kg/Kap/Tahun dari target 35.01 Kg/ Kap/Tahun
4. Nilai Tukar Nelayan memiliki nilai realisasi 107,62 dari target 101,35 atau sebesar 106 %
5. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan mencapai nilai realisasi 95,39 dari nilai target 98 atau sebesar 97,33 %
6. Indikator Luasan Kawasan Pesisir dan Konservasi Pesisir dan Perairan mencapai realisasi 27.343,57 Ha dari target sebesar 27.343,57 Ha atau 100 %
7. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB mencapai realisasi sebesar 1,67 % dari target 1,6 % yang ditetapkan atau mencapai 100 %

4.2. Langkah-langkah Perbaikan ke Depan

1. Peningkatan efektifitas dan optimalisasi usaha penangkapan ikan
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
3. Pengkayaan sumberdaya ikan dilaut melalui kegiatan restocking, rumpon, rumah ikan dll
4. Memproduksi induk unggul dan benih bermutu, dan Memproduksi pakan mandiri
5. Membantu pembudidaya terhadap akses permodalan
6. Melaksanakan Monitoring ekosistem wilayah pesisir, Rehabilitasi ekosistem wilayah pesisir, Pengendalian pencemaran di wilayah pesisir.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 202



LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
 Tahun : 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	395.427 Ton
2	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,35 Persen
3	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	340.000 Ton
		Angka Konsumsi Ikan	35,01 Kg/Kap/Thn
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	98 Persen
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perairan	Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	27.343,57 Ha
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	1,6 Persen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 518.822.500	APBD
2. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.422.127.173	APBD
3. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.103.628.457	APBD
4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 404.562.632	APBD
5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 245.103.850	APBD
TOTAL	Rp 6.694.244.612	

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


MUHAMMAD BOBBY AFIF-NASUTION

Medan, 14 Juli 2025

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,**


HAMDAN SUKRI SIREGAR, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197706262003121004

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepa



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. SUPRYANTO, M.M
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

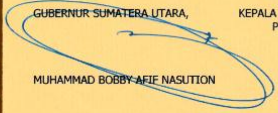
Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 11 Desember 2025

Pihak Kedua,

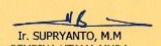
GUBERNUR SUMATERA UTARA,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Pihak Kesatu,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Ir. SUPRYANTO, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196603111998031004

LAMPIRAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

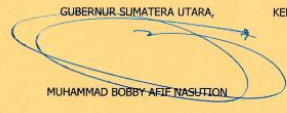
Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	395.427 Ton
2	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,35 Persen
3	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	340.000 Ton
		Angka Konsumsi Ikan	35,01 Kg/Kap/Thn
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTRI)	98 Indeks
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Perairan	Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan	27.343,41 Ha
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	1,6 Persen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 387.772.400	P. APBD
2. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.079.235.000	P. APBD
3. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.346.367.040	P. APBD
4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 424.550.632	P. APBD
5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 295.093.850	P. APBD
TOTAL	Rp 5.533.018.922	

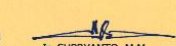
Medan, 11 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Ir. SUPRYANTO, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196603111998031004